



RIAU
| ISTIMEWA!

PUSPARAGAM
CERPEN | PUISI | ESAI

EDITOR
SULONG A'DZAM SHUHUF | KAZZAINI KS | MUHAMMAD AMIN





EDITOR

Sulong A'dzam Shuhuf | Kazzaini Ks | Muhammad Amin

PENULIS

Bambang Kariyawan Ys, dkk.

**AL-FURQAN**
PRESS

EDITOR :
Sulong A'dzam Shuhuf, Kazzaini Ks, Muhammad Amin

RIAU Istimewa!

Pusparagam Cerpen, Puisi, dan Esai

ISBN : 978-623-6598-61-0

PENGGAGAS :
Sulong A'dzam Shuhuf

EDITOR :
Sulong A'dzam Shuhuf
Kazzaini Ks
Muhammad Amin

KURATOR CERPEN :
Fakhrunnas MA Jabbar
Mosthamir Thalib

PENULIS :
Bambang Karyawan Ys, dkk.

KURATOR PUISI :
Husnu Abadi
Kazzaini Ks

RANCANG SAMPUL :
Furqon Elwe

KURATOR ESAI :
Muchid Albintani
Muhammad Amin

TATA LETAK :
647 & QOM

PENERBIT :
UIRpress,
bekerja sama dengan **Panitia Penerbitan Buku "RIAU Istimewa!"**,
dan **Pemerintah Provinsi Riau;**
diterbitkan dengan Dana CSR TA 2023 **PT Bumi Siak Pusako.**

REDAKSI :

U

P R E S S

UIRpress, Kampus Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 113, PEKANBARU - RIAU
Website : <https://uirpress.uir.ac.id>
Pos-el : uirpress@uir.ac.id
Telp./HP : 0813-8015-8085

CETAKAN PERTAMA, Agustus 2023.

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.
DILARANG MEMPERBANYAK KARYA TULIS INI
DALAM BENTUK DAN DENGAN CARA APAPUN
TANPA IZIN TERTULIS DARI
PANITIA PENERBITAN BUKU "RIAU ISTIMEWA!".



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT [xi]
TEPAK SIRIH : Pengantar Editor [xiii]
TEPAK ANJUNG : Elu-eluan Dewan Pengasas [xix]
DULANG JULANG : Elu-eluan Dewan Kehormatan [xxiii]
DULANG KENCANA : Sambutan Gubernur Riau [xxxi]

KITAB KESATU : Sejarah Ringkas KRR I & II [1]

KITAB KEDUA : Cerpen & Puisi [71]

KITAB KETIGA : Esai [369]

SENARAI PENULIS [871]

LAMPIRAN [919]

POTRET TABRANI RAB DALAM BINGKAI WACANA DAN GERAKAN RIAU MERDEKA

OLEH

Ronny Basista

Abstracts

In the “Reform” era, Tabrani Rab, known as a doctor and a lecture who has concerned for the poor (low-level people)—to whom people complained—and the domineering center appeared with his discourse of freedom among federalism and region autonomy discourse. Then, with his supporters, he crystallized his thought in a battle “Freedom of Riau”. Therefore, this study aimed at providing a description about Tabrani Rab’s contribution to discourse and movement of Riau’s freedom. Then, it observed the position of both discourse and movement in political contest of Riau. This study may be categorized in a description and the applied approach was an inductive approach. The result of the study was that both discourse and movement sinked below the discourse of region autonomy in local politics’s contest of Riau. In context of the internal movement it didn’t have such a group solidarity, a high-idealism, a clear point of view and mission and a credible and competent opinion leader. Riau’s freedom was still no longer in incubation. The political mission of Tabrani with his movement of Riau’s freedom could be shown of his political act. And, his political act showed that the true mission of Tabrani Rab was to the prosperity and justice for Riau.

Key Words : *Tabrani Rab, Riau’s freedom, Local politics.*

A. Pendahuluan

Rezim Orde Baru tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi aspirasi rakyat. Kondisi ini menjadikan rakyat pada posisi marginal. Pusat mendominasi urusan Daerah, sementara rakyat termarginal dan mempertanyakan fungsi negara. Pada konteks politik lokal, Riau merupakan salah satu yang tak dilupakan oleh realitas politik demikian. Rakyat Riau tak lepas dari unsur-unsur termarginalisasi di tengah kekayaan alamnya. Di balik itu, Daerah tak kuasa menembus benteng otoritarian Pusat dengan pola sentralisasi. Pada skala lokal di Riau, hal ini telah berembrio sejak Pemerintah Pusat mengenyahkan pilihan rakyat Riau atas Ismail Suko sebagai gubernur pada tahun 1985. Itu di bidang politik. Di sektor ekonomi, marginalisasi hak-hak rakyat dan Daerah terus dilakukan melalui eksplorasi kekayaan alam tanpa kompensasi yang dianggap logis.

Fakta di atas dengan disertai realitas politik yang ada hanya dapat ditanggapi masyarakat Daerah dalam bahasa-bahasa satir, senyam-senyum ketir, rajuk-rajuk kecil, serta dalam bentuk amuk-amuk kecil, kegalauan, keresahan dan sedu-sedan. Jika pun ada semacam teriakan, itu akan tenggelam oleh represif kekuasaan, bunyi derap sepatu lars militer, dan kemudian terbenam ke dalam lubuk hati.

Dalam kondisi seperti ini, ternyata, ada seorang cendekiawan yang terus melakukan “penyadaran-penyadaran” umat, meski aksinya hanya sebatas sayatan pena di media massa. Dialah Tabrani Rab, seorang yang berprofesi dokter dan dosen. Dari kesadarannya yang dalam terhadap kondisi demikian dia mulai membuat sebuah “jendela kecil” di sebuah harian (*Riau Pos*) untuk “berjuang” dan “berteriak” agar warga Riau dapat mengintip dalam dunia mereka yang gelap yang ternyata masih ada tersisa sebuah cahaya lewat atap daun (*tempias*) untuk melihat “dunia sana”.

Tabrani merupakan salah satu dari segelintir tokoh Riau yang diakui sebagai pembela masyarakat kecil. Latar belakang dia sebagai orang kampung dan cukup berpendidikan menjadikan dia paham tentang kondisi masyarakat bawah. Pengalaman politiknya cukup mendukung untuk mengemban

aspirasi mereka. Dari hal demikian dia memperoleh suatu *trust* dari kaum tertindas, khususnya di Riau. Dia menjadi tempat mereka mengadu, berkeluh-kesah, bersedu-sedan, atas apa yang telah menimpa mereka. Berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan rakyat kecil ini senantiasa menghampiri keseharian Tabrani yang dikenal sebagai seorang dokter. Ketika tidak berdaya di hadapan konglomerat yang didukung oleh birokrat dan dibekingi oleh aparat sehingga masyarakat ini menjadi melarat, Tabrani merupakan tempat akhir mereka mengadu. Yang dapat diperbuat Tabrani untuk memperjuangkan nasib mereka ini ada dua cara. *Pertama*, langsung “menggebrak” ke muka pejabat bersangkutan, dan *kedua*, menyalurkannya melalui tulisan di media massa. Begitu pula terhadap hasil pemantauan dan pengamatannya yang dilakukannya sendiri.

Gerakan reformasi yang bermuara pada tumbangannya rezim Orde Baru membuka kran-kran demokrasi yang sebelumnya tersumbat. Dalam konteks politik lokal di Riau, hal ini dimanifestasikan dalam berbagai pemikiran dan tindakan. Sebab, saat inilah orang mulai menyadari hak-haknya. Lebih tepat lagi, orang mulai berani memperjuangkan hak-haknya. Lebih jauh lagi, bila pemerintah tak bisa menerima usulan-usulan yang menurut pengusulnya masuk akal dan penting direalisasi, meninggalkan pemerintah bukan hal yang mustahil lagi. Itulah yang kemudian dipikirkan oleh Tabrani Rab.

Pola hubungan Pusat-Daerah ini mulai dipersoalkan. Wacana ketidakadilan yang selama ini terpendam meruak hingga mencapai berbagai aksi dan tuntutan. Wacana federalisme, bagi hasil yang rasional, hingga merdeka merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Poin terakhirlah yang dicetuskan Tabrani Rab.

Awalnya, pikiran-pikiran itu merupakan sebuah wacana yang dilontarkan Tabrani ke masyarakat luas. Dari sebuah diskusi intern di kampus yang mencuatkan wacana “Riau Merdeka” menjadi berkembang ke tengah masyarakat. Wacana “Riau Merdeka” adalah muara dari seluruh hasil pengamatan Tabrani atas kondisi masyarakat dan daerahnya.

Akhirnya, Tabrani Rab, sebagai salah seorang tokoh Riau yang dikenal sebagai pemimpin kaum marginal di Riau ini mengkristalkan wacana “Riau Merdeka” ini dalam bentuk “Gerakan Riau Medeka” disusul diproklamasikannya “Riau Berdaulat” pada 15 Maret 1999. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi persoalan yang diangkat oleh penelitian ini adalah, bagaimanakah kontribusi Tabrani Rab dalam wacana dan gerakan Riau Merdeka? Lalu, bagaimana posisi wacana dan gerakan itu dalam kontestasi politik lokal di Riau?

B. Landasan Teori

1. *Opinion Leadership* dan Kepemimpinan Informal

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat, manusia selalu membutuhkan manusia lain. Mereka saling tergantung dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingannya. Dalam kondisi ini, manusia selalu mengadakan hubungan dengan orang lain. Hubungan itu lazim disebut kegiatan interaksi atau komunikasi. Adanya komunikasi dan interaksi sosial yang intens memungkinkan tersebarnya berbagai wacana dan pemikiran di tengah masyarakat. Wacana selalu saja mengandung pesan yang hendak disampaikan. Dalam konteks penelitian ini, pesan itu muncul setelah adanya suatu deprivasi yang melanda sebagian besar masyarakat Riau.

Maka, untuk mencapai sebuah pesan tersampaikan secara efektif, dikenal beberapa faktor yang mesti dicermati.

- Kelompok yang menyampaikan pesan pada individu atau kelompok lain. Komunikatornya disebut *opinion leaders*.
- Pesan apa yang hendak disampaikan.
- Dengan media atau saluran apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
- Kepada siapa pesan itu hendak disampaikan.
- Apa efek dari suatu pesan yang disampaikan itu.¹
- Apa yang hendak dituju dari penyampaian pesan itu.

¹ Onong E. Effendi, *Kepemimpinan dan Pemimpin*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 61.

Kepercayaan atau *trustworthy* berkaitan erat dengan kesan penerima atas sifat atau karakter sumber, sedangkan kompetensi berkaitan dengan kesan penerima atas kemampuan atau kecakapan yang dimiliki sumber. Dengan demikian, masyarakat akan menerima informasi yang disampaikan *opinion leader* sebagai agen perubahan atau suatu hal. Oleh karenanya, dibutuhkan kredibilitas yang tinggi dari seorang *opinion leader*. Menurut Rogers dan Shomaker, kredibilitas dalam hal ini adalah,

“suatu tingkat di mana seorang sumber atau perantara komunikasi merasa dapat dipercaya dan mampu oleh penerimanya. Permasalahan yang sering disorot adalah individu sebagai sumber atau perantara untuk meyakinkan pesan. Jika klien (masyarakat) merasa bahwa agen perubahan memiliki relatif tinggi kredibilitas daripada sumber dan perantara lain, klien akan lebih menerima pesan dari agen perubahan tersebut”.²

Di negara berkembang seperti Indonesia, *opinion leader* merupakan hubungan yang penting antara para ahli yang mengirim pesan tentang cara perbaikan di dalam masyarakat. Pada konteks ini, *opinion leader* mempunyai peran penting dalam proses penyebarannya.³ Sehingga, sebagai *opinion leader* pada umumnya mempunyai sifat lebih terbuka terhadap semua bentuk komunikasi, lebih “kosmopolitan”, kedudukan status sosial yang lebih tinggi dan lebih inovatif.⁴ Sebab, kepada masyarakat media massa hanya “mengajarkan” informasi dasar. Tetapi, sebelum mereka melakukan kegiatan (aksi) atas dasar informasi baru itu, mereka perlu digerakkan oleh orang-orang yang mereka kenal dan dihormati yang terdapat di lingkungannya.⁵

² Rogers M. Everret dan Floyd Shomaker, *Communication and Inovation: A Cross Cultural Approach*, London: MacMillan Publisher, 1971, hlm. 224.

³ Astrid S. Susanto, *Komunikasi dan Media*, Jakarta: LP3ES, 1974, hlm. 77.

⁴ Rogers, *Communication.*, hlm. 45.

⁵ Onong O. Effendi, *Komunikasi dan Modernisasi*, Bandung: Alumni, 1973, hlm. 125.

Opinion leader diharapkan mempunyai kepemimpinan yang pada hakekatnya adalah untuk mengajak orang-orang bekerjasama melakukan kegiatan tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, orang yang mempunyai peranan sebagai pemimpin yang baik biasanya adalah orang yang dihargai. Sehingga, masyarakat yang memberikan pada pemimpin sebuah status dan kewenangan menyebabkan sang pemimpin mempunyai pengaruh dan wibawa besar. Sedangkan kebaikan dan hal-hal yang menguatkan hubungan tergantung pada hasil pengaruh kedua belah-pihak.

Dalam setiap masyarakat terutama masyarakat tertentu yang masih menghargai tradisi, biasanya muncul pemimpin informal yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Mereka dihormati sebagai orang tua atau yang dituakan. Begitu pula pada masyarakat kecil yang tertindas, akan muncul pula pemimpin informal tempat mereka mengayom. Menurut Sondang P. Siagian, hal ini terutama karena memproyeksikan sifat-sifat dan gaya hidup yang pantas dijadikan teladan atau panutan oleh para anggota masyarakat lainnya. Biasanya merupakan orang-orang yang dituakan dari kalangan tokoh-tokoh adat, para ulama dan guru.⁶

Sebagai orang yang dituakan, dihormati dan diharapkan dapat menyelesaikan segala konflik dan memprakarsai solusi masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pemimpin informal sebagaimana halnya dengan pemimpin formal juga memiliki ciri-ciri yang spesifik. Menurut Kartini Kartono, ciri-ciri tersebut, antara lain: ⁷

1. Tidak memiliki penunjukan formal (dilantik) atau legitimitas sebagai pemimpin.
2. Dia tidak memerlukan persyaratan formal tertentu, tidak memiliki atasan.

⁶ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 34.

⁷ Dirangkum dari Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 9.

3. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok masyarakat yang mengakuinya sebagai pemimpin masih menerima dan mengakuinya.
4. Apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum. Hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang sehingga ditinggalkan oleh massanya.

Sebagai pemimpin masyarakat, maka seperti halnya dengan pemimpin formal, pemimpin informal juga merupakan elit penentu dalam masyarakatnya. Mereka antara lain merupakan lambang kolektif yang memainkan peranan sosial dalam masyarakat. sebagai lambang kolektif dapat bersifat kognitif, moral dan ekspresif. Lebih lanjut Suzanne Keller menyatakan bahwa,

“Segi kognitif adalah golongan elit sebagai ahli teknik dan pemegang wewenang yang tahu bagaimana dan apa yang dilakukan, dan bagaimana mencapai tujuan-tujuan tertentu. Elit penentu juga mempunyai peranan-peranan yang dinyatakan sebagai obyek cinta dan kebencian. Mereka diharapkan untuk mengetahui, menilai dan memberi kesenangan”.⁸

2. Wacana dan Gerakan Sosial

Wacana adalah perangkat lunak (*software*) untuk mendekonstruksi sebuah gerakan. Dalam tahapan suatu gerakan, posisi wacana terletak pada tahap awal tumbuhnya (persiapan menuju) gerakan, atau yang lebih dikenal dengan masa inkubasi. Gerakan Riau Merdeka merupakan variasi dari gerakan sosial di samping, misalnya, gerakan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan HAM, gerakan perempuan, gerakan separatis dan lain sebagainya.

Gerakan sosial merupakan salah satu pokok perhatian dalam studi *collective behavior*. *Collective Behavior* sendiri merupakan salah satu cabang dalam ilmu sosial yang mempelajari bentuk-bentuk tindakan kolektif

⁸ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali, 1984.

yang tingkat pelembagaannya rendah. Tingkah laku kolektif adalah bentuk tindakan kelompok yang lebih ditentukan oleh norma yang timbul secara spontan daripada tindakan kelompok yang didasarkan atas norma-norma formal.⁹ Lebih tegasnya, Turner dan Killian menyatakan,

*A social movement is a collectivity acting with some continuity to promote a change or resist a change in the society or group of which it is a part as a collectivity. A movement is a group with indefinite and shifting membership, with leadership whose position is determined more by the informal response of the members than by formal procedures for legitimizing authority.*¹⁰

Dengan kata lain, seperti yang dinyatakan John Wilson, bahwa gerakan sosial akan menggunakan cara-cara yang bersifat non institusional dalam melakukan suatu perubahan sosial.¹¹ Jika didefinisikan, gerakan sosial merupakan satu kelompok yang bersimpati terhadap pandangan sosial atau doktrin tertentu yang menampakkan dirinya dalam perdebatan politik sehari-hari, dan untuk itu siap terlibat dalam partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya untuk mewujudkan pandangan sosial yang diyakininya tersebut, seperti demonstrasi atau pertemuan-pertemuan periodik lainnya.¹² Adapun David F. Aberle mendefinisikan suatu gerakan sosial sebagai, Satu usaha yang terorganisir oleh sekelompok manusia untuk menimbulkan perubahan di hadapan tekanan manusia lainnya. Dibedakan dari usaha-usaha individu secara murni, dibedakan juga dengan aksi kerumunan ... dan gerakan sedemikian ini kemudian diklasifikasikan

⁹ Turner dan Killian, *Collective Behavior*, Prentice-hall, USA, 1957, hlm. 3-4. Lebih lanjut lihat pula cetakan kedua, Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-hall, 1972, hlm. 246.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 308.

¹¹ John Wilson, *Introduction to Social Movement*, New York: Basic Books, 1973, hlm. 8-15.

¹² Tom Bottomore, *Sosiologi Politik*, terjemahan, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 29-30.

menurut jumlah perubahan (total ataupun parsial) dan tempat perubahan (dalam sistem individu atau dalam sistem supra individual tertentu).

Dapat pula disebut sebuah gerakan jika mengandung unsur suatu gerakan bersama, suatu kekacauan di antara manusia, suatu kegelisahan, suatu usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang divisualisasikan, khususnya terhadap suatu perubahan dalam lembaga sosial tertentu.¹³ Perubahan merupakan hakekat dari suatu gerakan sosial, yaitu perubahan pada institusi tertentu yang menjadi sasaran dari gerakan yang bersangkutan. Artinya, gerakan sosial mempunyai nilai krusial dalam proses reproduksi dan transformasi dari keseluruhan sistem sosial. Ia merupakan kekuatan yang memperjuangkan suatu sistem aksi sejarah yang telah mapan dan berusaha mengarahkan perkembangan suatu masyarakat ke dalam saluran yang berbeda.¹⁴

Setiap gerakan sosial, apa pun bentuknya, mempunyai komponen-komponen pasti, yaitu ideologi, program atau seperangkat tujuan, taktik-taktik dalam mencapai tujuan, dan pemimpin. Uraian berikut memperjelas makna di atas.

- *Ideology is a set of beliefs and values that justify social conditions or that provide a unified criticism of those conditions and justify alternative patterns.*
- *Goals is the specific defined conditions that a movement seeks to achieve.*
- *Tactics: the specific, day to day actions taken to achieve stuted goals.*
- *Leaders: those who speak in the name of the group, help guide its effort, sereve as role models and inspire the rank and file.*¹⁵

¹³ Rudolf Haberle, *Social Movement*, New York: Appleton Century Croft, 1951, hlm 5.

¹⁴ Tom Bottomore, *Sosiology.*, hlm 22.

¹⁵ Rose, et. al., *Sociology: Inquiring into Society*, San Fransisco: Peter I. Confield Press, 1977, hlm. 535.

Atau, dengan kata lain, setiap gerakan memiliki ciri-ciri berikut.

- Mempunyai ideologi perjuangan.
- Merumuskan tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan usaha perubahan atau menentang perubahan tertentu dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat.
- Menggunakan taktik *unconvensional* untuk mencapai tujuan, baik bersifat kekerasan maupun tanpa kekerasan.
- Merupakan “usaha sadar” atau sedikit banyak terorganisir di bawah tipe-tipe kepemimpinan tertentu.
- Memiliki solidaritas kelompok dan idealisme yang tinggi.
- Memiliki cakupan potensi yang luas.¹⁶

Adapun kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan penting.

1. Masa inkubasi atau persiapan

Masa ini meliputi kondisi sosial kemasyarakatan yang memungkinkan terjadinya gerakan sosial, seperti stabilitas dan deferensiasi stuktur sosial, perubahan yang meruntuhkan norma-norma masyarakat, tumbuh dan berkembangnya keyakinan umum (wacana), dan munculnya kejadian tertentu yang dapat memicu meledaknya gerakan.

2. Masa aksi

Merupakan tahap perwujudan tindakan secara nyata oleh pengikut gerakan. Pada masa ini orang-orang yang mempunyai kepribadian yang sama mulai mengadakan hubungan satu dengan lainnya dan secara terbuka menyatakan kemarahan, ketidakpuasan, keresahan dan tuntutan.¹⁷

3. Masa pelembagaan

Merupakan tahap akhir dari suatu gerakan sosial. Biasanya, setelah mencapai tujuannya, suatu gerakan sosial mulai kesulitan memobilisasi massa, sehingga lama-kelamaan terpaksa mengalihkan kegiatan gerakan melalui organisasi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 536.

¹⁷ Lebih rinci lihat Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science*, London: Longman, 1978, 262-264.

formal yang lebih terstruktur. Atau, gerakan tersebut sudah menjadi terintegrasi dengan masyarakat.¹⁸

C. Cara Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis. Dari pengertian itu jelaslah bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.¹⁹

Pemaparan secara deskriptif dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada usaha menggambarkan situasi atau kejadian yang dimaksud sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ciri-ciri metode deskriptif yang menyertainya, antara lain,

2. Jenis Data

Data suatu penelitian, menurut Hadari Nawawi, dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Data primer, yaitu data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik, karena diperoleh dari tangan kedua.²⁰

¹⁸ Lihat I Ketut Putera Erawan, *Perjalanan Gerakan Mahasiswa Indonesia 1966-1978*, Yogyakarta: skripsi S1 Fisipol Universitas Gadjah Mada, 1989.

¹⁹ Winarno Surachmat, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1975, hlm. 131.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode.*, hlm. 80.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian ini maka data-data harus tersedia. Untuk itu, pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode/teknik, yaitu:

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik dari buku, jurnal, koran, majalah ilmiah, dan lain-lain. Atau, cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹
- b. Teknik Wawancara, dengan bebas terpimpin. Wawancara dapat dilakukan terhadap seorang atau mereka yang terlibat dalam obyek penelitian ini, yakni obyek yang diteliti maupun mereka yang relevan untuk dijadikan responden.
 - 1) Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur (kriterium) kebenaran data utama untuk menguji kebenaran atau ketepatan (obyektifitas) serta ketelitian data utama yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data utama untuk dijadikan sebagai data pembanding atau pengukur (kriterium), sehingga diharapkan dapat ditarik kesimpulan dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi.
 - 2) Dalam penelitian ini, wawancara juga digunakan sebagai alat pengumpul data pelengkap. Atau, untuk melengkapi data dan/atau informasi yang belum didapat melalui teknik dokumentasi—maupun teknik wawancara utama—sebagai upaya mengumpulkan data penunjang yang diperkirakan dapat digunakan untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan atau memperjelas kesimpulan.

²¹ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 95, 133.

4. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisa kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih pada upaya mencari pemahaman (*understanding*)²² karena penelitian ini merupakan suatu studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek penelitian yang bersangkutan menjadikan data ini dianalisis secara kualitatif. Berbagai data yang dikumpulkan itu lalu disajikan secara *time-series* atau sesuai urutan waktu yang menunjukkan bagaimana pengaruh dan posisi Tabrani Rab dalam wacana dan gerakan kemerdekaan Riau.

Ada empat tahapan teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, *pertama*, pengumpulan data, dilakukan dengan teknik dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang bersumber pada wawancara dan data dokumenter. Tahap *kedua*, penilaian data, berpegang pada prinsip validitas, reliabilitas dan otentitas, sehingga hanya data-data yang relevan saja yang dipakai. Pada tahapan inilah data-data tersebut dibaca, dipahami, lalu diorganisir berdasarkan kategori tema atau pola tertentu.

Tahap *ketiga* adalah penafsiran atau interpretasi data. Dalam usaha untuk menafsirkan atau menginterpretasi data, peneliti berusaha menganalisisnya dengan menggunakan dasar perspektif berbekal teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini. Tahap *keempat*, yang merupakan tahap terakhir, adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dinilai dan ditafsirkan. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis yang dilakukan.

²² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 108.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Riau Merdeka diproklamkan Tabrani Rab pada 15 Maret 1999. Momentumnya adalah tuntutan minyak 10% oleh masyarakat Riau yang tidak kunjung dikabulkan Pemerintah. Sebuah proklamasi ini menyusul terbentuknya suatu gerakan yang mengiringinya, yakni apa yang disebut “Gerakan Riau Merdeka”. Sebagai varian dari sebuah gerakan sosial, ternyata, gerakan ini tidak bergerak ke fase-fase layaknya sebuah gerakan, seperti tahap *masa aksi*, dan *masa kelembagaan*. Sedangkan Tabrani Rab, sebagai pemimpin gerakan ini, akhirnya menyatakan keluar. Berikut dijabarkan temuan-temuan mengenai apa yang terjadi dengan gerakan ini, bagaimana posisi dan peranan Tabrani Rab dalam hal ini, dan mengapa demikian.

1. Undang-undang No 22 dan 25 Tahun 1999: Sebuah Kontra Wacana

Sesungguhnya, dalam sebuah kontestasi politik di Riau, wacana merdeka ini berdampingan dengan wacana-wacana lain yang beredar di tengah masyarakat. Yakni, wacana federalisme dan otonomi daerah. Pertarungan wacana tersebut berlangsung melalui berbagai polling, jajak pendapat, dan seterusnya. Namun, ketika “pertarungan” itu belum usai, Tabrani Rab dan para pengikutnya mendeklarasikan “Riau Berdaulat” sebagai eufimisme dari “Riau Merdeka”.

Segera, “Riau Merdeka” yang sebenarnya masih sebatas wacana ini, direspon oleh Pemerintah Pusat. UU No 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akhirnya mendapat persetujuan DPR RI untuk disahkan. Tentu saja, keluarnya undangundang yang cukup menjanjikan ini bukan semata-mata “andil” Riau Merdeka, sebab ini merupakan salah satu agenda reformasi yang mesti dituntaskan. Namun, agaknya tidak dapat menafikan andil Riau Merdeka dalam menyegerakan terbitnya undang-undang ini.

Secara tidak langsung, isu Riau Merdeka semakin kurang populer di tengah masyarakat. Dalam hal ini, alam pikiran masyarakat saat itu dikuasai oleh alur pemikiran bahwa otonomi merupakan suatu harapan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Sebab, otonomi sudah di depan mata, sedangkan kemerdekaan *entah* bagaimana mencapainya. Dominannya wacana Otonomi Daerah ini memerosokkan wacana merdeka yang sebelumnya sempat populer. Prinsip-prinsip federalisme yang terdapat dalam undang-undang ini menggeser pula wacana negara federal. Lambat laun, gerakan ini ditinggalkan pula oleh mereka yang sebelumnya antusias dengan wacana ini. Bahkan, termasuk sang penggagasnya sendiri.

2. Kredibilitas dan Kompetensi *Opinion Leaders*

Dari hal tersebut, kegagalan penyampaian yang efektif sebuah wacana Riau Merdeka adalah juga kegagalan seorang komunikator. Meski Tabrani Rab dikenal memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, status pemimpin informal yang melekat padanya atas dasar dia sering menjadi tempat orang bertanya, status sosial yang tinggi,²³ begitu pula bahwa Tabrani cukup terhormat di tengah masyarakat, tetap saja tidak dapat berbuat banyak dalam menggerakkan massa. Bahasa-bahasa provokatif yang terus dia lontarkan²⁴ dalam setiap isu yang dia sampaikan tetap tidak bisa menggiring orang secara efisien ke sebuah tindakan nyata. Berarti, ada sesuatu yang “tidak beres” pada sang komunikator.

Kesan yang dirasakan masyarakat luas terhadap *opinion leader*, dalam hal ini figur Tabrani Rab, adalah karakter sang komunikator yang sering berubah-ubah sikap. Masyarakat tetap menganggap dia sebagai tokoh

²³ Menurut Rogers, hal tersebut merupakan sebuah modal yang besar untuk menggalang opini masyarakat melalui penyampaian yang efektif. Rogers M. Everret dan Floyd Shomaker, *Communication.*, hlm. 45.

²⁴ Misalnya, “penjahanam Pusat terhadap Daerah,” “Pusat meluluhlantakkan Daerah,” dan nada-nada provokatif lainnya yang sering disampaikan Tabrani dalam melontarkan setiap isu/pesan.

terhormat, dihargai, sangat konsen terhadap rakyat kecil dan daerahnya, namun tetap tidak lekang kesan bahwa dia sering berjalan *zig-zag*, susah ditebak antara alur pikiran dan tindakan, dan seterusnya. Hal ini diperkuat oleh kenyataan henggangnya dia ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Di sinilah persoalannya, utamanya dalam konteks sebuah gerakan.

Lebih lanjut, Al Azhar, tokoh yang disebut-sebut sebagai Presiden Riau Merdeka, menyimpulkan bahwa pada konteks pemikiran, Tabrani memang tidak perlu diragukan. Namun, pada tataran praktis, dia merupakan figur yang “sulit dipegang” dan “melelahkan”. Kenyataan ini menyebabkan sebagian orang pada awalnya merasa frustrasi dengan sikap Tabrani yang susah dibaca ini, dan pada selanjutnya akhirnya terbiasa dengan polanya ini.²⁵

Akibatnya, kredibilitas Tabrani Rab, khususnya dalam mengemban dan memperjuangkan suatu gagasan politik yang dia sendiri canangkan, menurun. Padahal, kredibilitas yang tinggi seseorang merupakan suatu keharusan untuk dapat meyakinkan individu lain. Hal ini ditegaskan oleh Rogers dan Shomaker, bahwa kredibilitas adalah,

“suatu tingkat di mana seorang sumber atau perantara komunikasi merasa dapat dipercaya dan mampu oleh penerimanya. Permasalahan yang sering disorot adalah individu sebagai sumber atau perantara untuk meyakinkan pesan. Jika klien (masyarakat) merasa bahwa agen perubahan memiliki relatif tinggi kredibilitas daripada sumber dan perantara lain, klien akan lebih menerima pesan dari agen perubahan tersebut”.²⁶

Selain itu, yang patut disorot adalah kompetensi atau yang berkaitan dengan kesan penerima atas kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh komunikator tersebut. Dalam hal ini, tidak ada yang meragukan Tabrani Rab. Dia

²⁵ Wawancara dengan Al Azhar, 24 Februari 2003, di Sekretariat FKPMR, Pekanbaru.

²⁶ Rogers M. Everret dan Floyd Shomaker, *Communication*, 1971, hlm. 224.

memiliki dana besar untuk melakukan aktivitas politiknya. Dengan penerbitan yang dia miliki, dia sanggup menerbitkan buku-buku yang tebal untuk membangun wacana Riau Merdeka. Dengan kemampuannya dia telah menjadikan rumah sakitnya sebagai salah satu yang kesohor di Pekanbaru. Pun, dia pernah memimpin sebuah media massa. Dia diterima berbagai kalangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Riau. Dia pun punya akses yang bagus terhadap pengambil keputusan di Daerah.²⁷ Intinya, dia memiliki jaringan dan koneksi yang cukup luas dan beragam. Namun, mengapa tetap saja wacana dan gerakan yang dia bangun tidak mendapat tempat yang signifikan di hati masyarakat. Mengapa pesan atau visi yang dia sampaikan tidak diterima efektif masyarakat.

Jika ditilik dari kemampuan yang dia miliki di atas, memang tidak ada yang meragukan. Namun, suatu gerakan yang dibangun melalui sebuah wacana membutuhkan manajer yang handal dalam mengorganisir isu-isu tersebut menjadi kekuatan kolektif yang potensial. Kemampuan manajerial yang tinggi tidak cukup tanpa adanya *opinion leader* yang cakap dan mumpuni menyampaikan pesan. Sebaliknya, seorang komunikator pun tidak pula efektif tanpa adanya kemampuan manajerial yang handal. Tabrani, tidak memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dalam mengorganisasi wacana dan gerakan yang dia bangun.

Sebenarnya, itu bisa ditutupi oleh figur lain yang dinilai cakap dalam hal administrasi ini. Namun, kesan yang tampak di permukaan adalah bahwa Tabrani sering berjalan sendiri, atau elitis. Dia bak *single-fighter*, mahasiswa yang di belakangnya lebih diposisikan sebagai “penggembira”. Mereka memang sangat mendukung

²⁷ Bahkan, belakangan dia juga memiliki akses ke istana negara, khususnya pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), karena dia merupakan sahabat Gus Dur. Pada poin tertentu, membaca seorang Tabrani hampir sama susahnya dengan membaca seorang Gus Dur. Begitu pula dengan penampilan fisik mereka.

Tabrani, namun kekuatan itu tidak dibungkus oleh sebuah organisasi yang mapan. Akhirnya, dari sebuah kompetensi yang minim dari aspek manajerial, kepercayaan masyarakat pun tumbuh akan ketidakmampuan seorang Tabrani Rab dalam mewujudkan gagasannya itu. Kredibilitas seorang *opinion leader* memang mutlak diperlukan, dan itu dilengkapi oleh sebuah kompetensi yang handal.

Adapun mengenai henggangnya Tabrani dari Gerakan Riau Merdeka dan menyeberang ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dapat dijelaskan oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, kontra-wacana berupa Otonomi Daerah menegaskan penerimaan Tabrani terhadap konsep otonomi, sehingga dia memilih keluar dari gerakan tersebut. *Kedua*, tujuan sebenarnya bukan Riau Merdeka, melainkan keadilan dan kesejahteraan bagi Riau, sehingga dia memilih duduk di DPOD—karena merasa di wadah ini dia bisa memperjuangkan dua hal itu secara optimal. *Ketiga*, adanya friksi dalam tubuh gerakan dan semacam “mosi tidak percaya” atas kepemimpinannya, sehingga dia memilih henggang.

Dari ketiga hal di atas, poin terakhir dibantah oleh Presiden Riau Merdeka saat ini, Al Azhar, yang ketika itu menjabat sebagai panglima. Azhar menegaskan bahwa, “tidak ada friksi dalam tubuh gerakan ini. Bahkan, beberapa hari sebelum dia memutuskan ke DPOD, kami melakukan rapat mengenai Deklarasi Pekanbaru yang baru dilaksanakan”.²⁸ Selain poin ini, dua hal lainnya merupakan sebuah analisis dari tingkah laku politik Tabrani yang terekam.

²⁸ Wawancara dengan Al Azhar, 24 Februari 2003. Deklarasi Pekanbaru yang diadakan pada tanggal 29 Juni 2000 ini diikuti oleh perwakilan tiga Daerah: Riau, Aceh dan Papua. Mereka sepakat membentuk semacam aliansi. Tabrani merupakan salah seorang anggota delegasi Riau pada pertemuan yang dilangsungkan hanya beberapa hari sebelum dia memutuskan menerima tawaran duduk di DPOD. Selanjutnya mengenai Deklarasi Pekanbaru, lihat, Muchid Albintani, *Dari Riau Merdeka sampai Otonomi Nol*, Pekanbaru: Unri Press, 2001, hlm. 49-52.

3. Kohesivitas yang Lemah: Dari Inkubasi menuju Inkubasi

Gerakan Riau Merdeka belum dapat disebut sebagai sebuah gerakan yang *truly* “gerakan sosial”. Selain konsolidasi belum terbangun seutuhnya, ia juga tidak tajam dalam ideologi perjuangan.²⁹ Sebab, ideologi merupakan “*a set of beliefs and values that justify social conditions or that provide unfied criticism of those conditions and justify alternative patterns.*”³⁰ Dan, komponen ini mutlak dimiliki sebuah gerakan layaknya. Selain itu, jumlah massa pendukung yang masih minim (agak elitis) memperkuat dugaan bahwa secara kuantitas gerakan ini belum memadai.

Lalu, tidak adanya rumusaan “tujuan-tujuan khusus” yang berkaitan dengan usaha perubahan atau menentang perubahan tertentu dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, yang hendak dituju oleh gerakan ini adalah merdeka, berdaulat dan seterusnya. Untuk mencapainya digunakan taktik inconvensional, kekerasan atau non kekerasan, terorganisir, dibungkus oleh solidaritas kelompok dan idealisme yang tinggi, memiliki cakupan yang luas dan seterusnya.

Akhirnya, dilihat dari tahapan sebuah gerakan yang dikenal, fakta di atas menunjukkan bahwa sebuah gerakan “Riau Merdeka” masih dalam tahap inkubasi. Dia masih menghimpun wacana yang tumbuh menjadi keyakinan umum dan kondisi sosial kemasyarakatan di Riau. Bisa saja ketika tiga aspek yang selama ini disorot—kemiskinan kebodohan dan lingkungan hidup—makin menampakkan sebuah instabilitas dan deferinsiasi struktur sosial, serta perubahan yang justru meruntuhkan norma-norma masyarakat, tahap *Masa Aksi* untuk meledakkannya tinggal hanya menunggu momentum yang tepat—tentu saja harus—dengan konsolidasi yang kuat.

²⁹ Bandingkan dengan, Zulfan Heri, *Riau Beroposisi*, Pekanbaru: Unri Press, 2002, hlm. 280-284.

³⁰ Lihat, Peter I. Rose, et. al., *Sociology: Inquiring into Society*, San Fransisco: Confield Press, 1977, hlm. 535.

E. Kesimpulan

Kegagalan sebuah gerakan Riau Merdeka disebabkan oleh dua faktor, eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan kontra-wacana yang efektif yang dilancarkan dan kemudian direalisasikan oleh Pemerintah, yakni Otonomi Daerah. Hal ini mendukung alur pikiran yang dominan di tengah masyarakat di mana otonomi merupakan suatu harapan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Sebab, otonomi sudah di depan mata, sedangkan kemerdekaan *entah* bagaimana mencapainya. Dominannya wacana Otonomi Daerah ini memerosokkan wacana merdeka yang sebelumnya sempat populer. Prinsip-prinsip federalisme yang terdapat dalam undang-undang ini menggeser pula wacana negara federal. Lambat laun, gerakan ini ditinggalkan pula oleh mereka yang sebelumnya antusias dengan wacana ini. Bahkan, termasuk sang penggagasnya sendiri, Tabrani Rab, yang memilih hengkang ke DPOD sebagai bentuk penerimaannya terhadap konsep otonomi.

Adapun faktor internal terletak pada, *pertama*, kredibilitas dan kompetensi *opinion leader* dalam menyampaikan visi mereka. Kedua hal inilah yang tidak dimiliki Tabrani Rab selaku *opinion leader* dalam konteks Riau Merdeka. Kredibilitasnya merosot oleh karakternya yang sering tidak konsisten, kompetensinya di bidang manajerial suatu gerakan membuat orang sulit menerima dengan baik visi dari gerakan ini. Adapun yang *kedua*, konsolidasi belum terbangun seutuhnya, ia juga tidak tajam dalam ideologi perjuangan. Komponen ini mutlak dimiliki sebuah gerakan layaknya. Selain itu, jumlah massa pendukung yang masih minim (agak elitis) memperkuat dugaan bahwa secara kuantitas gerakan ini belum memadai. Lalu, tidak tegasnya rumusan “tujuan-tujuan khusus” yang berkaitan dengan usaha perubahan atau menentang perubahan tertentu dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Akhirnya, faktor-faktor di atas membenamkan Riau Merdeka itu ke fase inkubasi. Itulah yang terjadi dengan Gerakan Riau Merdeka kini, mereka masih kembali bermain

di taraf wacana, dan lebih spesifik ke 3 (tiga) aspek kehidupan, yakni kemiskinan, kebodohan dan lingkungan hidup. Fase ini merupakan inkubasi dari sebuah perjalanan panjang suatu gerakan.

Sedangkan untuk menjelaskan misi politik Tabrani dengan gagasan Riau Merdeka-nya dapat dilihat dari perilaku politiknya. Dan, dari perilaku politik yang sempat terekam menunjukkan bahwa misi dia sesungguhnya adalah “keadilan dan kesejahteraan” bagi Riau. Kini, setelah hingar-bingar, hiruk-pikuk dan euforia melanda Tabrani dengan wacana dan gerakan Riau Merdeka-nya, tidak ada lagi terdengar “bunyi” Riau Medeka. Sunyi, sepi, senyap. Hanya sayup-sayup suara jangkriklah yang memekikkan “Riau Medeka” di Riau sana. Itulah yang dimaksud judul dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aberle, David F., “A Classification of Social Movement” dalam *The Peyote Religime Among the Navaho*, Chicago: Aldine Publishing Aberle Co., 1966.
- Albintani, Muchid, *Dari Riau Merdeka sampai Otonomi Nol*, Pekanbaru: Unri Press, 2001.
- Bottomore, Tom, *Sosiologi Politik*, (terjemahan oleh Sahat Simamora), Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Effendi, Onong E., *Kepemimpinan dan Pemimpin*, Bandung: Alumni, 1977.
-, *Komunikasi dan Modernisasi*, Bandung: Alumni, 1973.
- Erawan, IKP., *Perjalanan Gerakan Mahasiswa Indonesia 1966-1978*, Yogyakarta: skripsi S1 Fisipol Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, 1989.
- Haberle, Rudolf, *Social Movement*, New York: Appleton Century Croft, 1951.
- Hagopian, Mark N., *Regimes, Movement, and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science*, London: Longman, 1978.
- Heri, Zulfan, *Riau Beroposisi*, Pekanbaru: Unri Press, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.

- Moleong, L. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Rogers, Everret M. dan Shomaker, Floyd, *Communication and Inovation: A Cross Cultural Approach*, London: MacMillan Publisher, 1971
- Rose, Peter I., et.al., *Sociology: Inquiring into Society*, San Fransisco: Confield Press, 1977.
- Siagian, Sondang P., *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Surachmat, Winarno, *Dasar-dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1975.
- , *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Susanto, Astrid S., *Komunikasi dan Media*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- Turner, and Killian, *Collective Behavior*, USA: Prentice-hall, 1957., dan Englewood Clifis New Jersey: Prentice-hall, cet. 2, 1972.
- Wilson, John, *Introduction to Social Movement*, New York: Basic Books, 1973.

SENARAI PENULIS

DAFTAR ISI

01. **Abd. Naddin Shaididin**; Kinabalu, Sabah – MALAYSIA.
02. **Abdul Malik**; Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
03. **Abdul Shukor Embi**; Pulau Pinang – MALAYSIA.
04. **Adhiet's Ritonga**; Tanjungbalai, Sumatera Utara.
05. **Agus Sri Danardana**; Jakarta, DKI.
06. **Agusta** (Agus Takariyanto); Sleman, DI Yogyakarta.
07. **Ahmad David Kholilurrahman**; Jambi, Jambi.
08. **Akbal Marfianda**; Tembilahan, Riau.
09. **Anto Narasoma**; Palembang, Sumatera Selatan.
10. **Aprinus Salam**; Yogyakarta, DI Yogyakarta.
11. **Aris Setiyanto**; Temanggung, Jawa Tengah.
12. **Ashi Drajad Lumintu**; Pekanbaru, Riau.
13. **Asmariah**; Yogyakarta, DI Yogyakarta.
14. **Auradian Marta**; Pekanbaru, Riau.
15. **Bambang Karyawan Ys**, Pekanbaru, Riau.
16. **Bambang Widiatmoko**; Yogyakarta, DI Yogyakarta.
17. **Chaidir**; Pekanbaru, Riau.
18. **Christya Dewi Eka**; Semarang, Jawa Tengah.
19. **Dalle Dalminto**; Bantul, DI Yogyakarta.
20. **Deni Afriadi**; Pekanbaru, Riau.
21. **Dessy Wahyuni**; Pekanbaru, Riau.
22. **Dheni Kurnia**; Pekanbaru, Riau.
23. **Eko Supriyatno**; Bogor, Jawa Barat.
24. **Ellya Roza**; Pekanbaru, Riau.
25. **Fahmi Wahid**; Balangan, Kalimantan Selatan.
26. **Fakhrunnas MA Jabbar**; Pekanbaru, Riau.
27. **Fandi Setiawan Hidayat**; Meulaboh, Aceh.

28. **Feradis Nurdin**; Pekanbaru, Riau.
29. **Haryono AS**; Pekanbaru, Riau.
30. **Henny Purnawati**; Pontianak, Kalimantan Barat.
31. **Heza Hara**; Duri, Riau.
32. **Husnu Abadi**; Pekanbaru, Riau.
33. **Iis Singgih**; Malang, Jawa Timur.
34. **Isbedy Stiawan ZS**; Tanjungkarang, Lampung.
35. **Ismail Dt. Podano Montoi**; Kotatengah, Riau.
36. **Jefri Al Malay**; Pekanbaru, Riau.
37. **Kasmanto Rinaldi**; Pekanbaru, Riau.
38. **K. Suheimi**; Pekanbaru, Riau.
39. **Listi Mora Rangkuti**; Pekanbaru, Riau.
40. **Marzuli Ridwan Al-bantany**; Bengkalis, Riau.
41. **Misdianto**; Pekanbaru, Riau.
42. **Mohd. Adid Ab Rahman**; Melaka – MALAYSIA.
43. **Mohd. Rosli Bakir**; Pontian, Johor – MALAYSIA.
44. **Mosthamir Thalib**; Pekanbaru, Riau.
45. **M. Rawa El Amady**; Pekanbaru, Riau.
46. **Muchid Albintani**; Pekanbaru, Riau.
47. **Muhammad Herwan**; Pekanbaru, Riau.
48. **Mu'jizah**; Jakarta, DKI Jakarta.
49. **Mulyadi J. Amalik**; Surabaya, Jawa Timur.
50. **Murparsaulian**; Pekanbaru, Riau.
51. **Mustiar AR**; Meulaboh, DINAD.
52. **Ngakan Made Kasub Sidan**; Klungkung, Bali.
53. **Nok Ir**; Sumenep, Jawa Timur.
54. **Nordin bin Hasyim**; Pulau Pinang – MALAYSIA.
55. **P. Nuraeni**; Sukabumi, Jawa Barat.
56. **Prawiro Sudirjo**; Bekasi, Jawa Barat.
57. **Rahulia Khairil Hamdar Sinaga**; Tanjungbalai, Sumatera Utara.
58. **Raja Cinta**; Muaro Bungo, Jambi.

59. **Rian Kurniawan Harahap**; Pekanbaru, Riau.
60. **Rida K. Liamsi**; Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
61. **Riki Utomi**; Pekanbaru, Riau.
62. **Ronny Basista**; Wellington – NEW ZEALAND.
63. **Ruskin Har**; Pekanbaru, Riau.
64. **Santiadi Lala**; Tanjungbalai, Sumatera Utara.
65. **Sholikin**; Bekasi, Jawa Barat.
66. **Siamir Marulafau**; Medan, Sumatera Utara.
67. **S. Ratman Suras**; Deliserdang, Sumatera Utara.
68. **St. Fatimah**; Surabaya, Jawa Timur.
69. **Sukma Putra Permana**; Jakarta, DKI Jakarta.
70. **Sulong A'dzam Shuhuf**; Pekanbaru, Riau.
71. **Suwardi MS**; Pekanbaru, Riau.
72. **Syafuddin Saleh Sai Gergaji**; Pekanbaru, Riau.
73. **Syaiful Pandu**; Pekanbaru, Riau.
74. **Taufik Ikram Jamil**; Pekanbaru, Riau.
75. **Tien Marni**; Pekanbaru, Riau.
76. **TM. Sum**; Pekanbaru, Riau.
77. **UU. Hamidy**; Pekanbaru, Riau.
78. **Warsono Abi Azzam**; Cilacap, Jawa Tengah.
79. **Wiwin Herna Ningsih**; Bandung, Jawa Barat.
80. **Zaid Md Saman al-Haj**; Negeri Sembilan – MALAYSIA.
81. **Zulfadhli**; Bagansiapiapi, Riau.

Bahasa, Jakarta 2015 dan Pemangku Prestasi Seni (bidang Sastra) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Riau 2016.



RONNY BASISTA, S.IP., M.Si, Ph.D. adalah dosen tetap di FHSIP Universitas Terbuka dalam program studi Ilmu Pemerintahan. Menamatkan Ph.D (Political Science and International Relations) di Victoria University of Wellington – New Zealand. Pernah juga menjadi dosen di Universitas Abdur Rab, Pekanbaru (2004~2008), serta sebagai koordinator UPBJJ-UT Pekanbaru (2011~2016).

Pengalaman organisasi antara lain :

- ❖ Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada 2008~2012;
- ❖ Wakil Ketua AIPI Riau (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) pada 2011~2016;
- ❖ Anggota New Zealand Political Studies, sejak 2017;
- ❖ Penerima penghargaan dari LPDP Kementerian Keuangan RI.



Drs. **RUSKIN HAR**, MBA. adalah seorang birokrat. Terakhir menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Riau hingga 2006. Sebelumnya mantan Ketua KNPI Riau ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Riau. Wafat tahun 2016.

SANTIADI LALA adalah nama pena dari Santiadi Salsabila, biasa dipanggil Lala, perempuan cantik ini lahir di Tanjungbalai, 17 November 2003, gemar menulis puisi, cerpen, esai, dan resensi buku. Memiliki bakat menulis sejak SD, kemudian semakin terasah berkat sering mengikuti Lomba Menulis, Puisi, Cerpen dan Resensi Buku. Bakatnya semakin tajam sejak mengikuti kursus Menulis di Sanggar Pelangi. Lala merupakan



Memasuki tahun awal kemerdekaan Republik Indonesia, seorang sultan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Kasim II, menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa Kesultanan (Kerajaan) Siak Sri Indrapura bergabung ke dalam negara Republik Indonesia. Istimewanya lagi, Sultan Siak bukan hanya sekadar mengintegrasikan Kesultanan Siak yang politiknya pada saat Proklamasi Republik Indonesia 1945 masih merupakan sebuah negara tersendiri yang merdeka, namun juga menyerahkan seluruh kekayaannya berikut uang sejumlah 13 juta gulden.

Drs. H. Syamsuar, M.Si; gelar Datus Seel Setia Amanah,
Gubernur Provinsi Riau.



UIRpress, Kampus Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 113, PEKANBARU - RIAU
Website : <https://uirpress.uir.ac.id>
Pos-el : uirpress@uir.ac.id
Telp./HP : 0813-8015-8085

ISSN 978-623-8298-01-0

